

**JALAN TENGAH
DESENTRALISASI
BAGI DAERAH OTONOM
BERKARAKTERISTIK
KEPULAUAN DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**JALAN TENGAH
DESENTRALISASI
BAGI DAERAH OTONOM
BERKARAKTERISTIK
KEPULAUAN DI INDONESIA**

Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si.



**JALAN TENGAH DESENTRALISASI BAGI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK
KEPULAUAN DI INDONESIA**

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-477-0

15 x 23 cm

xxii, 410 hlm

Cetakan ke-1, April 2020

Kencana. 2020.1245

Penulis

Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si.

Desain Sampul

Suwito

Tata Letak

Lintang Novita & Iam

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.

Dengan senang hati saya membuat kata pengantar buku yang ditulis oleh kolega dosen IPDN, Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si, yang berjudul *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia*. Saya mengenal dengan baik penulis karena yang bersangkutan pernah menjadi asisten dosen membantu saya mengampu matakuliah Teori Desentralisasi dan Ekologi Pemerintahan di IPDN selama lebih kurang empat tahun. Pengenalan karakteristik akademik penulis lebih saya alami setelah bersama-sama menulis buku berjudul *Politik Desentralisasi di Indonesia* (tahun 2017), yang diterbitkan oleh IPDN Press.

Pengalaman menulis buku bersama saya mendorong penulis untuk lebih memperdalam mengenai teori desentralisasi, khususnya desentralisasi asimetris, yang kemudian mendorongnya masuk mengikuti perkuliahan program doktor di Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan lulus tahun 2019 dengan predikat *cumlaude*. Disertasi yang diambil Penulis berjudul “Penyelenggaraan Desentralisasi Di Daerah Otonom

Berkarakteristik Kepulauan Pasca Reformasi” yang kemudian sebagian besar materinya dikembangkan menjadi buku yang berada dihadapan sidang pembaca.

Rasa ingin tahu secara mendalam tentang desentralisasi asimetris di daerah otonom berkarakteristik kepulauan awalnya didasarkan pada pengalaman pribadi, karena penulis berasal dari Provinsi NTT—salah satu dari delapan provinsi yang terus berjuang untuk terbitnya UU tentang Daerah Berciri Kepulauan. Anggota lainnya yakni Provinsi NTB, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Tetapi upaya pembuatan UU khusus tentang daerah kepulauan sampai saat ini masih dalam angan-angan, meskipun sebagian materi RUU-nya telah diakomodasi di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi mengenai perimbangan keuangan bagi daerah-daerah kepulauan tampaknya akan diakomodasikan pada UU yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest archipelagic state in the world*). Negaranya terdiri dari 17.504 pulau, yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017 sebanyak 16.056 pulau. (*Harian Merdeka 19 Agustus 2017*). Dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (3.544.744 km² dari keseluruhan luas 5.455.675 km²). Oleh karena itu, Indonesia adalah negara maritim seperti Jepang, Philippina, Inggris. Sebutan Indonesia sebagai negara maritim terakhir tertuang dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) Tahun 1999-2004. Setelah masa itu, sebutan negara maritim kemudian tenggelam.



Perhatian negara pada laut dan kelautan sangat terbatas. Pada masa orde lama dan orde baru belum dibentuk sebuah kementerian yang khusus mengurus soal kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan baru dibentuk tahun 1996. Padahal Indonesia memperoleh momentum pada saat Deklarasi Djuanda yang dicetuskan tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu yakni Djuanda Kartawidjaja yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Terjadi perubahan paradigma dalam melihat wilayah Indonesia. Semula wilayah Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau dipisahkan oleh lautan, kemudian diubah menjadi dihubungkan oleh lautan. Dengan paradigma laut sebagai penghubung, maka pulau dan kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah. Deklarasi Djuanda tersebut kemudian diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/ UNCLOS-1982*) yang diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia 2.936.345 km² yang diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980.

Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tetapi pemerintahannya lebih banyak berorientasi pada daratan. Hal tersebut perlu memperoleh perhatian bagi semua kalangan, sehingga diperlukan pemikiran untuk mengubah paradigma pengelolaan negara, termasuk pengelolaan daerah melalui desentralisasi asimetris dengan memberi perhatian pada daerah-daerah yang berciri kepulauan.

Bangsa Nusantara sejatinya adalah bangsa maritim. Hal ini dapat dilacak dari berbagai catatan sejarah kerajaan-kerajaan



besar di tanah Nusantara, terutama dua kerajaan besar tonggak Nusantara yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya pada masanya merupakan kerajaan maritim terbesar se-Asia Tenggara. Wilayah pengaruhnya mencakup seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Semenanjung Melayu, bahkan sampai ke Thailand dan Laos. Kerajaan Majapahit (1293-1500 M) merupakan kerajaan maritim dengan kapal dagang dan kapal perang yang sangat besar dan banyak. Kapal jung Jawa pada masanya sangat disegani pelaut Portugis maupun Spanyol. Dengan semboyan “*Mitreka Satata*” yang artinya “Persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat”, Majapahit menguasai wilayah yang kemudian menjadi cikal-bakal negara Nusantara atau Indonesia. Pada saat Majapahit runtuh digantikan oleh Kerajaan Demak bentuknya masih kerajaan maritim, tetapi setelah keturunannya kalah oleh VOC, kerajaan Jawa bergeser menjadi kerajaan pedalaman, bukan kerajaan maritim lagi.

Pada masa perang kemerdekaan, yang dominan adalah perang daratan karena mengusir penjajah yang sudah ada di daratan. Oleh karena itu, peran tentara daratan lebih dominan dibandingkan tentara lautan. Taman makam pahlawan didominasi oleh pahlawan perang dari tentara daratan. Hanya sedikit sekali pahlawan perang lautan, karena perang di lautan juga sangat terbatas. Kebijakan dominasi tentara daratan tersebut berlanjut pada masa orde lama, karena banyaknya pemberontakan yang berlokasi di daratan. Oleh karena itu, Panglima TNI selalu dijabat oleh angkatan darat. Kebijakan politik tersebut semakin menguat pada masa orde baru yang dipimpin oleh presiden yang berasal dari AD. Tradisi tersebut kemudian berubah pada saat Gus Dur jadi presiden. Dengan kebijakan “revolusi biru” nya, Gusdur



mengangkat Panglima TNI dari AL (Laksamana Widodo Adi Sutjipto). Tetapi karena Gus Dur memegang jabatan presiden tidak lama, maka gagasan pengembangan potensi kelautan melalui revolusi birunya tenggelam bersama turunnya sang penggagas.

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perhatian pada masalah kelautan biasa-biasa saja, tidak merupakan program utama. Pada era ini muncul gagasan perlunya dibuat UU khusus mengenai daerah kepulauan yang digagas oleh delapan provinsi kepulauan, yang kemudian diperkuat melalui Deklarasi Batam Januari 2018. Gagasan membuat UU tentang Daerah Kepulauan kemudian kandas meskipun sudah masuk ke dalam Prolegnas 2014-2015. Pengaturan tentang daerah kepulauan kemudian diakomodasikan ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya BAB V dengan judul Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. Salah satu isi penting dari Bab tersebut adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) s/d ayat (6) yang intinya akan memberikan DAU dan DAK dengan memperhitungkan luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan. Tetapi pasal tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan karena revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum selesai.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo dibuat perubahan kebijakan yang signifikan berkaitan dengan kepulauan. *Pertama*, diubahnya paradigma pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris. *Kedua*, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tahun 2045, sebagai kelanjutan kejayaan Majapahit pada masanya. Pemerintahan yang ada selama ini melanjutkan



politik pemerintahan model Kerajaan Majapahit yang bias daratan dan berpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut kemudian menimbulkan ketimpangan, bukan hanya barat dan timur, tetapi antara daratan dengan kepulauan. Padahal ketimpangan menjadi salah satu faktor kegagalan negara. Menurut Foreign Policy, ada duabelas indikator kegagalan negara yakni: 1) *Demographic Pressure*; 2) *Refugees/IDP's*; 3) *Group Grievance*; 4) *Human Flight*; 5) *Uneven Development*; 6) *Economic Decline*; 7) *Delegitimization of The State*; 8) *Public Services*; 9) *Human Rights*; 10) *Security Apparatus*; 11) *Factionalized Elites*; 12) *External Intervention*. (Sumber: *Foreign Policy*).

Salah satu penyebab kegagalan negara adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam satu negara (*uneven development*). Di Indonesia ketimpangannya bukan lagi antara barat dan timur, melainkan antara daratan dan kepulauan. Daerah-daerah kepulauan umumnya tertinggal jauh dalam semua segi, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Melalui visi pertumbuhan Indonesia-sentris, maka disusun strategi dan perencanaan pembangunan dengan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Kebijakan yang akan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke satu daerah di Pulau Kalimantan, merupakan salah satu langkah strategis mewujudkan paradigma Indonesia-sentris. Dana yang berasal dari APBN diarahkan untuk pembangunan di luar Jawa, sedangkan pembangunan di Jawa lebih banyak diserahkan pada sektor swasta, meskipun strategi ini mengandung resiko politik yang cukup besar. Sebab lebih dari 50 persen pemilih berada di Pulau Jawa.



Pancasila sebagai dasar negara selama ini mengalami banyak distorsi dalam pelaksanaannya. Sila yang paling teraniaya adalah Sila Kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Terjadi ketimpangan dalam banyak hal di daerah-daerah kepulauan (akses, harga, fasilitas publi, dan lain sebagainya). Untuk mengatasinya dikembangkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia dan tol laut. Setiap gagasan perubahan akan menimbulkan pro dan kontra. Gagasan poros maritim dunia oleh sementara kalangan dianggap sebagai kepanjangan dari program China yang ambisius untuk menguasai dunia melalui OBOR (*One Belt, One Road*) dan BRI (*Belt Road Initiative*).

Buku yang ditulis Dr. Petrus Polyando menjadi penting dihadapkan pada gambaran sebagaimana dikemukakan di atas. Kebijakan desentralisasi asimetris untuk daerah kepulauan yang digagasnya sejalan dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, serta dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hal tersebut menuntut adanya perubahan paradigma dari pemerintah pusat yang selama lebih dari seperempat abad menjalankan pemerintahan sentralistik, represif, dan seragam dengan menekankan pada adagium “*One Policy fit for All*.” Melalui kebijakan desentralisasi asimetris perlu dikembangkan adagium “*Several Policies fit with Condition*,” dengan berbagai konsekuensi yang melekat didalamnya.

Seperti karakter orang Indonesia yang tidak suka pada sesuatu yang bersifat ekstrem, Dr. Petrus Polyando menawarkan jalan tengah desentralisasi asimetris bagi daerah kepulauan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan filosofi bangsa Indonesia yakni Pancasila yang pada hakikatnya adalah ideologi jalan tengah yang mengutamakan keselarasan. Ada enam gagasan



konseptual yang ditawarkan penulis yakni: 1) berkaitan dengan perumusan kebijakan desentralisasi asimetris; 2) penentuan kriteria parameter dalam penyerahan kewenangan pemerintahan; 3) penyusunan organisasi pemerintah daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan; 4) pengaturan sumber daya manusia secara khusus; 5) afirmasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam; 6) dukungan pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam rangka menjalankan sila kelima dari Pancasila, gagasan penulis menarik untuk menjadi bahan pembuat kebijakan di tingkat nasional, di tengah pro dan kontra perlunya undang-undang khusus yang mengatur tentang daerah berciri kepulauan yang masih terus bergulir. *Selamat membaca.*

Lembah Manglayang, medio Februari 2020

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.





PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal Mahakudus, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia* dapat diselesaikan dengan baik dan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Buku ini sesungguhnya menguraikan tentang penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia selama masa Reformasi. Hal menarik yang disorot adalah isu desentralisasi yang belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, padahal kebijakan desentralisasi yang telah silih berganti, dipilih sebagai alternatif solusional atas praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem sebelumnya yang dianggap gagal. Adapun dinamika kebijakan desentralisasi telah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Bahwa besaran kewenangan yang diserahkan diikuti dengan dukungan sumber daya lainnya

seperti anggaran, personel dan sarana prasarana lainnya yang memadai. Perlakuan tersebut semestinya semua daerah otonom meningkat kesejahteraannya secara signifikan termasuk daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Fakta angka kesejahteraan daerah tersebut masih tertinggal dari daerah lainnya menunjukkan hal yang sangat ironis sehingga perlu diungkap secara ilmiah. Untuk itulah semangat buku ini dihadirkan guna mengungkap faktor penyebabnya dan merumuskan gagasan solusionalnya.

Sajian awal dimulai dengan dinamika diskusi tentang problematika desentralisasi, baik secara konseptual yang berangkat dari gagasan para ahli dan kaum cerdik pandai serta hasil riset lainnya maupun secara empirikal yang mengisahkan persoalan penyelenggaraan desentralisasi di daerah-daerah termasuk daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia.

Paragraf selanjutnya sebagai *guidance* membedah persoalan tersebut maka dikemukakan dinamika konseptual desentralisasi dan otonomi daerah yang dikembangkan di berbagai negara. Pada bagian akhir dari paragraf ini dikemukakan kritik terhadap desentralisasi dan hubungan desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor determinan terhadap keberhasilan dan kegagalan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini sebagai petunjuk memahami secara spesifik beberapa penyebab terhadap hasil suatu kebijakan desentralisasi.

Mengingat lokus utama pembahasan adalah daerah otonom berkarakteristik kepulauan, maka perlu dikemukakan konsep daerah otonom berkarakteristik kepulauan secara umum dan juga gambaran kondisi salah satu daerah otonom berkarakteristik



kepulauan sebagai representasinya. Dalam hal ini Alor dipilih sebagai yang mewakili dengan pertimbangan kondisinya lebih representatif berada di daerah provinsi yang berkarakteristik kepulauan dengan jumlah sebaran penduduk di pulau-pulau lebih dari 50 persen.

Paragraf selanjutnya adalah ulasan mengenai perkembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi dengan sorotan pada daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Sebagai kelanjutan dari kisah dari paragraf ini, maka dimunculkan bagian berikutnya mengenai praktik desentralisasi yang terjadi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia.

Setelah mengungkapkan persoalan yang terjadi serta faktor penyebabnya yang berangkat dari interaksi politik dalam kebijakan maupun dukungan implementasi di lapangan, akhirnya buku ini ditutup dengan gagasan yang ditawarkan dalam rangka pertimbangan kebijakan desentralisasi yang semestinya bagi daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Gagasan ini dinamakan *jalan tengah* mengingat pertimbangan yang dimunculkan berangkat dari identifikasi faktor-faktor yang belum terakomodasi dalam penyelenggaraan desentralisasi selama ini. Bahwa ada celah dari kebijakan desentralisasi yang belum terisi dan belum menjangkau kebutuhan daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Untuk itu melalui pengungkapan terlebih dahulu faktor penyebabnya, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi implementasinya maka dirumuskan alternatif solusi yang perlu diperhatikan. Rumusan ini diyakini mampu menjawab kebutuhan daerah tersebut dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepulauan.



Sebagai sebuah karya ilmiah, buku ini diharapkan menjadi sebuah nilai monumental yang tetap tinggal di hati siapa saja khususnya para pemerhati desentralisasi. *Verba volant, scripta manent* (kata-kata boleh terbang tetapi tulisan akan tetap tinggal).

Dengan tersusunnya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberikan kesempatan serta membangkitkan keberanian melahirkan sebuah karya yang layak disajikan. Secara perinci ucapan terima kasih tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Yth. **Rektor IPDN** yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan diri dalam kebijakan penulisan buku literatur;
2. Ysi. **Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS.**, yang telah menjadi inspirasi, guru, orangtua, sahabat, teman berpikir yang bijak, yang selalu memberikan catatan kritis atas setiap tulisan penulis sehingga penulis menjadi semakin matang dan berani tampil dalam suatu karya ilmiah ini;
3. Ysh. Dua orang luar biasa dan sangat special Ibu **Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D.** dan Bapak **Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D.** yang mengenalkan penulis apa itu makna kualitas dalam sebuah karya yang disajikan. Penulis semakin percaya diri setelah ditempah mereka;
4. Yang termulia kedua orang tua penulis, sebagai persembahan khusus buat *Bapak Albinus (alm.)* dan *Mama Agnes (alm.)* yang tiada hentinya mendoakan penulis sukses menjadi kebanggaan sampai akhir hayatnya. Bahagia di Surga;



5. Yang tersayang istri penulis, **Inge Sri Nurhayati, S.Kom.** yang selalu memberi doa dan dukungan selama menulis buku ini;
6. Yang penulis banggakan dan senantiasa menjadi inspirasi, anak-anak tercinta **Margaretha Roswita Putri Polyando** dan **Brianna Anzelie Putri Polyando**;
7. Yang istimewa orang-orang yang selalu memberikan dukungan motivasi, perhatian, dan harapan agar penulis bisa sukses dengan karya-karya yang bermanfaat. (Dr. Hyronimus Rowa, Fanderson Aka, Florianus Aser, Helianus Rudianto, Adinda Siti Anisa, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di ruang ini, kalian tetap luar biasa di hati penulis);
8. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah mengetahui, mengikuti perkembangan, memberikan dukungan hingga selesainya buku ini. Bantuan Anda sangat berarti bagi penulis menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari bahwa karya yang disajikan ini masih banyak kekurangan meskipun telah berusaha maksimal untuk menghindarkan kesalahan. Karena itu, penulis menyampaikan ***Ab imo pectore*** permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada siapa saja yang meluangkan waktu memberikan catatan kritisnya. Bagi penulis, ungkapan *Corrie Ten Boom* layak mendapatkan tempat: *Si Pengkritik adalah Pengawal Jiwa yang bekerja tanpa dibayar.*



Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa manfaat kepada pembaca. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ini dapat berguna bagi pengembangan pembangunan di daerah otonom berkarakteristik kepulauan.

Bandung, Medio Februari 2020

Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S.

v

PRAKATA

xii

DAFTAR ISI

xix

BAB 1 PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

1

A. Isu Konseptual

1

B. Isu Empirikal

14

BAB 2 DINAMIKA KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

25

A. Konsep Hubungan antar Level
Pemerintahan

25

B. Makna dan Konsep Desentralisasi dan
Otonomi Daerah

40

C. Hubungan Konsep Desentralisasi dan
Otonomi Daerah

67

D.	Konsep Kewenangan	73
E.	Tujuan dan Manfaat Desentralisasi	78
F.	Klasifikasi Desentralisasi	88
G.	Perkembangan Pola Pembagian Kewenangan di Indonesia	97
H.	Kritik Terhadap Implementasi Desentralisasi	102
I.	Desentralisasi dan Otonomi Simetris dan Asimetris	108
J.	Hubungan Desentralisasi dan Kesejahteraan Masyarakat	117
K.	Alur Pikir Persoalan Desentralisasi di Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan	124
BAB 3	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DESENTRALISASI	131
A.	Pengantar	131
B.	Faktor Interaksi Politik dalam Kebijakan	133
C.	Faktor Dukungan Implementasi di Lapangan	146
D.	Catatan Penutup	154
BAB 4	DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN DI INDONESIA	157
A.	Konsep Umum Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan	157
B.	Gambaran Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia	165
C.	Alor sebagai Representasi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan	171



BAB 5	DINAMIKA KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN PASCAREFORMASI	183
A.	Pengantar	183
B.	Kerangka Politik (Konstitusi dan Kerangka Hukum)	186
C.	Kondisi Lingkungan Sosial Politik dalam Perumusan Kebijakan Desentralisasi	197
D.	Proses Perumusan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	229
E.	Keterlibatan Kelompok Sosial masyarakat Lokal dalam Kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah	235
F.	Parameter Penyerahan Urusan Pemerintahan	248
G.	Simpulan	264
BAB 6	PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN	267
A.	Pengantar	267
B.	Bentuk dan Susunan Organisasi Pemerintahan di Daerah Kepulauan	271
C.	Dukungan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Otonom Kepulauan (DPRD dan Aparat Birokrat)	284
D.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	303



E.	Hubungan Eksternal dengan Pemerintahan Supranasional (Pusat dan Provinsi)	310
F.	Konklusi	340
BAB 7	JALAN TENGAH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BAGI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN	343
A.	Catatan Penting Dinamika Kebijakan dan Penyelenggaraan Desentralisasi di Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan	343
B.	Gagasan Konseptual (<i>Jalan Tengah</i>) Desentralisasi dan Otonomi Daerah bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan	350
	DAFTAR PUSTAKA	365
	INDEKS	405
	TENTANG PENULIS	409



1

PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Bab ini berisi isu konseptual dan empirikal mengenai desentralisasi dan otonomi daerah.

A. ISU KONSEPTUAL

Gerakan demokrasi yang berdampak pada reformasi penyelenggaraan pemerintahan telah mencapai skala global dan menyebar ke seluruh dunia. Terjadi perubahan bentuk hubungan antara pemerintah nasional dan subnasional di berbagai negara mulai dari yang bersifat terpusat (sentralisasi), kemudian bersifat regional atau provinsional, serta bersifat kewilayahan atau kawasan dan bahkan bersifat kedaerahan (lokalitas). Beberapa bentuk hubungan tersebut lebih dominan kepada perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi (satu sistem yang terpusat) menjadi menyebar (desentralisasi) (Shah, 1998 dalam Alisjahbana, 1999: 2). Kecenderungan global terhadap desentralisasi telah mengalihkan wewenang, tanggung jawab dan sumber daya untuk fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Keating & McEwen, 2006; Bardhan & Mookherjee, 2006; Ahmad & Brosio, 2006; Oxhorn *et al.*, 2004;

2

DINAMIKA KONSEP DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Bab ini berisi konsep teoretis yang relevan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah yang berkembang.

A. KONSEP HUBUNGAN ANTARLEVEL PEMERINTAHAN

Pada hakikatnya pembicaraan desentralisasi dan sentralisasi sangat melekat dengan pembahasan mengenai hubungan antarlevel pemerintahan secara vertikal. Konkretnya mengulas bagaimana interaksi antarpemerintahan pada level yang lebih tinggi dengan level yang di bawahnya dalam relasi kekuasaan atau kewenangan. Spesifiknya berkaitan dengan apakah kekuasaan tersebut diletakkan pada satu pusat atau disebar pada beberapa entitas. Namun demikian, lahirnya kesepakatan melalui kebijakan sentralisasi atau desentralisasi ini tentu melalui tema besar sebelumnya tentang adanya interaksi yang terjadi antar berbagai entitas pemerintahan, baik secara berbeda tingkatan maupun dalam tingkatan yang sama. Untuk itu sebelum masuk kepada konsep desentralisasi dan otonomi daerah alangkah baiknya didahului dengan paparan mengenai konsep hubungan antarlevel pemerintahan.

3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN DESENTRALISASI

Bab ini berisi tentang faktor determinan terhadap keberhasilan dan kegagalan desentralisasi dan otonomi daerah

A. PENGANTAR

Beragam desain desentralisasi yang dipaparkan dari berbagai sarjana maupun kelembagaan resmi dunia pada kenyataannya telah menjadi referensi di berbagai negara berkembang untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil implementasinya tidak serta-merta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di semua daerah. Terdapat variasi hasil, di mana ada sebagian daerah di beberapa negara menikmati implikasi desentralisasi bagi percepatan pembangunan dan perubahan kehidupan sosial masyarakat daerah ke arah lebih baik. Di sisi lain, ada juga beberapa daerah masih memperlihatkan kondisi sosial yang serba sulit dengan kompleksitas persoalan yang

4

DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN DI INDONESIA

Bab ini menguraikan konsep daerah otonom berkarakteristik kepulauan.

A. KONSEP UMUM DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN

Pemahaman terhadap daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia diawali dengan pengenalan konsep umum daerah otonom kepulauan yang meliputi konsep daerah kepulauan, jenis daerah otonom ditinjau dari aspek geografis dan terakhir konsep daerah otonom berkarakteristik kepulauan. Uraian poin-poin konseptual ini sebagai upaya merumuskan kembali gagasan daerah otonom kepulauan yang diwacanakan dari beragam pendapat berdasarkan variasi pengetahuan dan disiplin akademik yang dimiliki. Tujuannya agar menghadirkan kepada para pihak mengenai dimensi daerah otonom berkarakteristik kepulauan dalam kerangka yang jelas. Hal ini berangkat dari fakta bahwa daerah otonom kepulauan merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks dan majemuk yang bisa dipahami dari berbagai sudut pendekatan. Penggunaan dimensi sudut pandang yang

5

DINAMIKA KEBIJAKAN DESENTRALISASI UNTUK DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN PASCA- REFORMASI

Bab ini berisi tentang perkembangan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca-Reformasi dengan sorotan pada daerah otonom berkarakteristik kepulauan.

A. PENGANTAR

Sistem desentralisasi pada masa reformasi, telah berkembang sangat dinamis dan sangat pesat seiring dengan kemauan politik pemerintah mengakomodasi tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Dinamika perubahan politik desentralisasi dapat dilihat dari undang-undang mengenai pemerintahan daerah, yang hingga saat ini telah mengalami tiga kali perubahan. Adapun undang-undang tersebut antara lain: UU Nomor 22 Tahun 1999 yang hanya berusia lima tahun, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. UU ini sepuluh tahun kemudian diganti dengan

6

PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN

Bab ini berisi praktik desentralisasi yang terjadi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia.

A. PENGANTAR

Transfer kewenangan yang besar kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi, telah memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, berdampak pada peningkatan intensitas aktivitas pemerintahan daerah guna menjalankan fungsi pemerintahannya. Sebagai instrumen yang efektif dan efisien dalam manajemen publik yang lebih besar guna memperbaiki tata koordinasi, memperpendek hierarki pengambilan keputusan serta menjamin stabilitas politik melalui legitimasi perbedaan dalam kebutuhan dan perspektif lokal (pluralisme), desentralisasi diterima sebagai upaya meningkatkan otonomi daerah dan peran lembaga lokal, serta

7

JALAN TENGAH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH BAGI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN

Bab ini berisi gagasan baru pertimbangan desentralisasi dan otonomi daerah yang semestinya bagi daerah otonom berkarakteristik kepulauan.

A. CATATAN PENTING DINAMIKA KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI DI DAERAH OTONOM BERKARAKTERISTIK KEPULAUAN

Lalu lintas diskusi mengenai kebijakan desentralisasi dan implementasinya selama masa reformasi sebagaimana disajikan pada paragraf sebelumnya, meletakkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan. Poin-poin tersebut sebenarnya menjelaskan aspek penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bahwa kondisi daerah otonom kepulauan yang secara faktual lebih rendah tingkat kemajuannya,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. Jakarta: The Habibie Center.
- Ahmad, E. & Brosio, G. (eds). 2006. *Handbook of Fiscal Federalism*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Anderson, W. A. 1960. *Inter-Governmental Relations In The Review*. Minneapolis: University of Minnesota Press 1960.
- Bardhan, P. & Mookherjee, D. (eds). 2006. *Decentralization and Local Governance in Developing Countries*. London: MIT Press.
- Barkley, Bruce T. & James H Saylor, 1994. *Customer Driven Project Management. A New Paradigma in Total Quality Implementation* Singapore.
- Blakely, E. J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: SAGE Publication, Inc.
- Breton, Albert. 1996. *Competitive Governments. An Economic Theory of Politics and Public Finance*. New York: Cambridge University Press.

- Bello-Imam, I.B. 1996. *Local Government in Nigeria: Evolving a Third Tier of Government*. Ibadan: Heinemann Educational Books (Nigeria) PLC.
- Booth, Philip. 1995. *Decentralization and Land-Use Planning in France: A 15-Year Review*," *Policy and Politics* 26(1): 89-105.
- Campbell, D.T & Stanley, J.C. 1966. *Experimental and Quasi Experimental Design for Research*. Rand Mc Nally company, Chicago.
- Caiden, Gerald E. 1969. *Administrative Reform*. Chicago: Allen Lane ThePenguin Press
- Christine Hudson. 1993. *Local Economic Development Policies and Local Government Autonomy in Sweden and Britain.*, Department of Political Science, University of Umeå, S-901 87 Umeå, Sweden.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Clark, G. L., and Dear, M. 1984. *State apparatus: structures and language of legitimacy*. London and Winchester, Mass.: George Allen & Unwin.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks.
- Djalal, Hasyim. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: Binacipta.
- Devas, Nick, dkk. 1997. *Financing Local Government In Indonesia: Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Terjemahan oleh Masri maris, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Denzin, N. 1970. *The Research Act in Sociology*. Chicago: Aldine.



- Derick W. Brinkerhoff & Omar Azfar. 2006. *Decentralization and Community Empowerment: Does community empowerment deepen democracy and improve service delivery?*, U.S. Agency for International Development Office of Democracy and Governance.
- De Winter, L, & H Türsan, eds., 1998. *Regionalist Parties in Western Europe*. London: Routledge.
- Devine, P. 1988. *Democracy and Economic Planning: The Political Economy of a Self-Governing Society*. Oxford: Polity Press.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2017. *Hukum Pemerintahan*. UNPAD Press, Bandung.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dkk. 2017. *Teori dan Praktik Kewenangan*, Pandya Press, Bandung.
- Dudley, G & Richardson, J. 2000. *Why Does Policy Change?: Lessons from British Transport Policy, 1945-99*. Routledge, London.
- Epple, D. & T. Nechyba, 2004. "Fiscal Decentralisation." in J.V. Henderson and JF Thisse (Eds.). *Handbook of Regional and Urban Economics*. Aldershot: Edward Elgar.
- Frederickson, H. George. *et al.* 2012. *Public administration—United States*.
- Ferazzi, Gabriel. 2008. *Laporan Akhir – Menjajaki Opsi Reformasi di Bidang Pembagian Urusan*.
- Fox. W. & I. H. Meyer. 1995. *Public Administration Dictionary*. London: Juta and Company Ltd.1995.
- Gaffar, Affan. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.



- Grindle, Merilee S. 1980. *Political Theory and Policy Implementation in the Third World*. NJ: Princeton University Press.
- Goldsmith A, Binkerhoff DW. 1990. *Sustainability and Rural Agriculture Development in Institutional Sustainability Agricultural and Rural Development*. Global Perspective. Praeger New York.
- Haris, Syamsudin, (ed). 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hadjon, Philipus M. 1998. *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hattingh, J. J. 1986. *Governmental relations – an introduction*. Pretoria: Unisa.
- _____. 1998. *Governmental Relations: A South African Perspective*. Pretoria: Unisa.
- Haug, Michael. 2007. *Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq*. CIFOR: Bogor.
- Hechter, M. 1975. *Internal Colonialism: The celtic Fringe in British National development, 1536-1966*. Berkeley: University of California Press.
- Humes, S. & Martin, E.M. 1961. *The Structure of Local Government throughout the World*. The Hague: Nijhoff Press.
- Iglesias, Gabriel, U. 1976. *Implementation the Problem of Achieving Result*. EROPA, Manila.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.



- Kaho, Josef Riwu. 1987. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamal, Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Karim, Abdul Gafar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keating, M. & McEwen, N. (eds). 2006. *Devolution and Public Policy: A Comparative Perspective*. London: Routledge.
- Kembauw, Esther, dkk. 2015. *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*. Russel & Russel, New York.
- Kertapraja, E. Koswara. 2012. *Pemerintahan Daerah*. Penerbit Jakarta, Inner.
- Koesoemahatmadja, RDH. 1979. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung.
- Litvack, Jennie & Jessica Seddon, editors., 1999. *Decentralization – Briefing Notes*. World Bank Institute.
- Litvack, J., Ahmad, J., Bird, R. 1999. *Rethinking Decentralization - A Discussion Paper*. The World Bank.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.

- Lofland, John & Lyn H. Lofland. 1984. *Analyzing Social Setting: A Guide To Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company.
- Maddick, Henry. 1966. *Democracy, Decentralization and Development*. Reprinted London, Asia Publishing House,. Diterjemahkan bebas dengan judul Desentralisasi Dalam Praktik. Cetakan Pertama, Pustaka Kendi, Yogyakarta.
- Mawhood, Philip ed. 1983. *Local Government in the Third World*. (Chichester UK: John Wiley & Sons).
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.
- _____. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Meheret, Ayenew. 2007. *A Rapid Assessment of Woreda Decentralization in Ethiopia, Decentralization in Ethiopia. In: TayeAssefa and Tegegne Gebere Egziabher, ed. 2007.*
- Mintzberg, H. 1983. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Moreno, L., 2001. *The federalization of Spain, The cass series in regional and federal studies 5*. London, Portland, OR: F. Cass.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California; SAGE publications Inc.
- Meagher, Patrick. 1999. "Cooperating Against Corruption: Governance, Collective Action, and Jurisdictional Design in Plural Societies." Mimeo. University of Maryland.



- Merriam, S. B. 2009. *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Muslimin, Amran. 1978. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Penerbit Alumni Bandung.
- Nasroen, M. 1954. *Soal Pembentukan Daerah Otonom Dan Tingkatan Daerah Otonom*. Endang, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung dkk. 2000. *Federalisme Untuk Indonesia*. Kompas, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo Jakarta.
- Oxhorn, P., Tulchin, J. S., & Selee, A. 2004. *Decentralization, Democratic Governance, and Civil Society in Comparative Perspective*. Washington: Woodrow Wilson Center Press.
- Otoghile, A. & Edigin, L. U. 2011. *Local Government Administration and Development: A survey of Oredo Local Government Area of Edo State*. Nigeria. African Research Review, 5(3).
- Obi, V. O. A., 2001. *Modern Local Government Practice In Nigeria*. (Enugu: Cecta (Nig) Limited 2001).
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- _____. 2015. Modul 1 Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.
- Pide, Andi Mustari. 1997. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

- Riggs, W. Fred. 1985. *Administrasi Negara- Negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatis*, Terjemahan oleh Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta, CV Rajawali dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rondinelli, Dennis A, & Cheema, G Shabbir. 1988. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications inc; Beverly Hills; California.
- Robbins S.P. 2001. *Organizational Behavior*. 9th edition. Prentice-Hall, New Jersey.
- Roux, N., Brynard, P., Botes, P. and Fourie, D. 1997. *Critical Issues in Public Management and Administration in South Africa*. Pretoria: Kagiso Tertiary.
- Royle, S.A. (2001). *A geography of islands: small island insularity*. Routledge, London and New York.
- Ruland, J. 1993. *Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*. Boulder: Westview Press.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Perspektif Otonomi Luas, Kumpulan Tulisan dalam Buku Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Pustaka Sinar Harapan Harian Suara Pembaruan, Jakarta.
- S.H. Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Salmon, Pierre. 1987. *Decentralization as an incentive scheme*, Oxford Review of Economic Policy 3, no. 2 (Summer), pp. 24-43.
- Seale, C. 1999. *Quality in qualitative research*. Qualitative Inquiry, 5(4), 465-478.



- Sheldon, Pauline J. 2005. *The Challenges to Sustainability in Island Tourism School of Travel Industry Management*, University of Hawai'i.
- Smoke, Paul. 2003. *Decentralisation In Africa: Goals, Dimensions, Myths And Challenges*, public administration and development, New York University, New York, USA.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.
- _____. 2012. *Decentralization The Territorial Dimension Of The State*; Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta.
- Soemantri, M. Sri. 1987. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni, Bandung.
- Stenbacka, C. 2001. *Qualitative research requires quality concepts of its own*. *Management Decision*,39(7), 551-555.
- Stewart, John. 1988. *Understanding the Management of Local Government: Its Special Purpose, Conditions and Task*. Longman Group UK Ltd.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Surianingrat, Bayu. 1979. *Pemerintahan di Daerah*. Penerbit IIP Jakarta.
- _____. 1980. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis*. Jakarta: Dewa Ruci Press.
- Subakti, Ramlan. 2001. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun konstitusi transisi: pergulatan kepentingan dan pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945*; Penerbit Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung.
- Tomaney, J., et al. 2009. “*The transformation of the state? Assessing the impacts of new public management in Norway.*” Oslo: Norwegian Institute of Urban and Regional Research.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Todaro, Michael, P. & Smith, Stephen, C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, Mark & David Hulme. 1997. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. London: Macmillan Press Ltd.
- USAID. 2009. *Democratic Decentralization Programming Handbook*. The United States Agency for International Development by ARD, Inc.
- United Nations. 1961. *A Handbook of Public Administratio: Current Concept and Practice with Special Reference to Developing Countries*. New York: Departement Of Economics and Sosial Affair.
- _____. (1962). *Technical Asistant Programe, Decentralization for National and Local Development*. New York: Departement of Economic and Social Affair, Division for Public Administration.
- Wasistiono, Sadu & Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia, Edisi Revisi yang diperluas*, IPDN Press Jatinangor.



- Wasistiono, S., Nurdin, I., & Fahrurozi, M. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*. Penerbit: Fokusmedia, Bandung.
- Weller, Marc & Katherine Nobbs. 2010. *Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts*. University Of Pennsylvania Press Philadelphia – Oxford.
- White, S. 2011. ‘*Government Decentralization in the 21st Century: A Literature Review*’. *A Report of the CSIS Program of Crisis, Conflict and Cooperation*. Washington: Centre for Strategic and International Studies.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Whiddett, Steve & Sarah Hollyforde. 1999. *The Competencies Handbook*. England: Institute of Personal and Development.
- Wolman, H. 1990. “*Decentralization: What it is and Why we should Care.*” In *Decentralization, Local Governments and Markets: Towards a Post-Welfare Agenda*, ed. R. J. Bennett. Oxford: Clarendon Press.
- Wright, D. S. 1972. *Understanding inter-governmental relations*. North Scituate Mass: Duxbury Press.
- _____. 1995. *Democracy and Federalism in the United States of America: Inter-Governmental Patterns, Politics and Perspective*. In: Aborisade, O. and –Mundt, R. (Eds.), *Local Government in Nigeria and the United States: Learning from Comparison*. Ibadan: Samadex.



NASKAH/ARTIKEL/JURNAL/MAKALAH

- Adamolekun, L. 1983. *Public Administration: A Nigeria and Comparative Perspective*. Lagos: Longman Books.
- Adesina, J. O. et al., 2010. *Rethinking the Social Protection Paradigm: Social Policy in Africa 's Development*. *Social Policy*, 28–30. Retrieved from <http://erd.eui.eu/media/BackgroundPapers/Adesina.pdf>.
- Adeline, N. I. 2014. *Local Government and Sustainable National Development in Nigeria*. *European Scientific Journal*, 10(25).
- Adedire, Solomon Adebayo. 2014. *Local Government and Intergovernmental Relations in Nigeria's Fourth Republic*, Covenant University Journal of Politics and International Affairs (CUJPIA) Vol. 2, No. 2, Dec. 2014. Department of Political Science and International Relations, Landmark University, Omu Aran, Kwara State.
- ADB. 2003. *Adb and social protection*.
- Adrianto, L. & Y. Matsuda. 2004. 'Study on assessing economic vulnerability of small island regions', *Environment, Development and Sustainability*, vol. 6: 317–36.
- Agrawal, A. & Ribot, J. 1999. "Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases", the *Journal of Developing Areas* 33, 4: 473-502.
- Alisjahbana, Armida S., 1999, "Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Bandung.
- _____. 1999. "Krisis Ekonomi serta Implikasi Fiskal Hubungan Keuangan Pusat Daerah", Makalah disampaikan



- pada Seminar Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia, Bandung.
- Antwi-Boasiako, Kwame Badu. 2010. *Administrative Decentralization: Should Districts and Regions elect their own Leaders in Ghana?* *African Social Science Review*, Volume 4(1):35-51; © 2010 CHSS.
- Approaches to the enhancement of government capacity and performance: panel IV. In: WILSON, Robert H., CRAMER, Reid (Eds.). *International workshop in governance*. Austin, TX: LBJ School of Public Affairs, 1997. p. 59-70.
- Arikan, GG. 2004. "Fiscal decentralization: A remedy for corruption?", *International Tax and Public Finance* 11 (2): 175-195;
- Arthanaya, I Wayan. 2011. *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, h. 178.
- Arden, A., Baker, C. & Manning, J. 2009. *Local Government Constitutional and Administrative Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Aspinall, E. & Fealy, G. 2003. "Introduction: Decentralization, Democratization, and The Rise of The Local' in Aspinall & Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization* , Institute of South East Asian Studies, Singapore, pp. 1-14.
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*, Disampaikan dalam "Lokakarya tentang Peraturan Daerah dan Budget Bagi Anggota DPRD se-Propinsi (baru) Banten" yang diselenggarakan oleh Institute for the Advancement of Strategies and Sciences (IASS), di Anyer, Banten, 2 Oktober 2000.



- Ayoade, J.A.A. 1980. "Inter-Governmental Relations in Nigeria". *Quarterly Journal of Administration*, 16(2): 119-132.
- Azfar, Omar, et al., 1999. *Decentralization, Governance And Public Services The Impact Of Institutional Arrangements* IRIS Center, University of Maryland, College Park September 1999.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2006-2010. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Balaguer-Coll, M. T., Prior, D., and Tortosa-Ausina, E. 2009. *Decentralization and efficiency of local government*. The Annals of Regional Science, forthcoming.
- Baldacchino, G. 2004. *The coming of age of island studies*, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 95, no. 3: 272-83.
- _____. 2006. 'Small islands versus big cities: lessons in the political economy of regional development from the world's small islands', The Journal of Technology Transfer, vol. 31, no. 1: 91-100.
- Barankay, I. and B. Lockwood. 2007. *Decentralization and the Productive Efficiency of Government: Evidence from Swiss Cantons*. Journal of Public Economics. 91 (5-6). pp. 1197-1218.
- Bardhan, P. 2004. "Governance Issues in Delivery of Public Services". *Journal of African Economies* 13 (Supplement 1):167-82.
- Batley, Richard and Stoker, Gerry (eds). (1991). *Local government in Europe: trends and developments*. Houndsmills: MacMillan.
- Bello M. L. 2014. *Intergovernmental Relations in Nigeria: An Assessment of Its Practice at the Local Government Level*. Journal of Poverty, Investment and Development - An Open Access International Journal Vol. 4 2014.



- Bennett, R. J. 1997. “*Administrative system and economic space*”, *Regional Studies*, 31(3): 323336.
- Benovetz, J. 1980. “*Federalism and Intergovernmental Relations: The American-Experience*”, *Quarterly Journal Administration*, 14(3):141-156.
- Bergh, S. 2004, *Democratic decentralisation and local participation: a review of recent research*. *Development in Practice*, 14(6), pp. 780–790.
- Bentham, J. 1970. *Of laws in general*. Edited by H. L. A. Hart. London: University of London, The Athlone Press.
- Bhola, H.S. 2004. “*Policy implementation: planning and actualization*”. *Journal of Educational Planning and Administration*, 18(3), 295-312.
- Bird, Richard M. 1994, “*A Comparative Perspective on Federal Finance*,” in K.G. Banting, D.M. Brown, and T.J. Courchene, eds., *The Future of Fiscal Federalism* (Kingston: School of Policy Studies, Queen’s University).
- _____. 2000. *Fiscal Decentralization and Competitive Governments*,” in Gianluigi Galeotti, Pierre Salmon, and Ronald Wintrobe, eds., *Competition and Structure: The Political Economy of Collective Decisions: Essays in Honor of Albert Breton*. New York: Cambridge University Press, pp.129-49.
- _____. 2003. “*Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent?*,” International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU paper0309, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Bird, Richard M. & Robert D. Ebel. 2005. “*Fiscal Federalism and National Unity* Brilantes Jr., *Decentralization Imperatives*,



- Lessons from Some Asian Countries*". *Journal of International Cooperation Studies*, Vol. 12 No. 1, August 2004, h. 39.
- Brancati, D. 2006. *Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism*. *International Organization* 60 (3): 651-85.
- Brennan, G., & J Buchanan. 1980. *The Power to tax, Analytical Foundations of a Fiscal Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Briguglio, L. 2004, "Economic vulnerability and resilience: concepts and Measurements", in L. Briguglio & E. Kisanaga (eds), *Economic vulnerability and resilience of small states*, Islands and Small States Institute of the University of Malta and Commonwealth Secretariat., Malta, pp. 43-53.
- Cerin, P. 2006. *Bringing economic opportunity into line with environmental influence: A Discussion on the Coase theorem and the Porter and van der Linde hypothesis*. *Ecological Economics*, 209-225.
- Clark, G. L. 1984. "A Theory of Local Autonomy." *Annals of the Association of American Geographers* 74 (2):195-208.
- Creswell, John W. & Dana L. Miller. 2000. *Determining Validity in Qualitative Inquiry*, THEORY INTO PRACTICE, Volume 39, Number 3, Summer 2000 Copyright © 2000 College of Education, The Ohio State University 0040-5841/2000.
- Cremer, J., Estache, A. & Seabright, P. 1996, *The Decentralization of Public Services: Lessons from the Theory of the Firm*. In: Estache, A. ed. *Decentralizing Infrastructure: Advantages and Limitations*. World Bank Discussion Paper 290. Washington, D.C.



- Conyers, D. 1983. *Decentralization: The Latest Fashion In Development Administration, Public Administration And Development*. Vol. 3 (97-109).
- Cohen, J. M. & Peterson, S. B. 1999. *Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries*, Kumarian Press (published for and on behalf of the United Nations), Draft Proof for Publication, June, 1999; pp. 16 – 20.
- Cohen, Stephen S. *et al.*, 1981. *Decentralization: A Framework For Policy Analysis*, Project on Managing Decentralization, Institute of International Studies, Berkeley: University of California.
- Congleton, Roger D. 2006. *Asymmetric Federalism and the Political Economy of Decentralization*. George Mason University.
- Darajati W. 2004. “Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan”. Seminar Nasional MFCDP. 2004 Sept 22; Jakarta, Indonesia. Jakarta: Bappenas. hlm 1-7. Tersedia pada www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8223.
- Davies, K. 1983. *Local Government Law*.
- Davies, D., & Dodd, J. 2002. *Qualitative research and the question of rigor*. *Qualitative Health research*, 12 (2), 279-289.
- De Brouwer, P.J.S. 2008. “Maslowian Portfolio Theory: An alternative formulation of the Behavioural Portfolio Theory”. *Journal of Asset Management*, 9(6), 359-365. DOI: 10.1057/jam.2008.35.
- deLeon P. 1990. “Policy Formation: Where Ignorant Armies Clash by Night”, *The Asian Journal of Public Administration*, 12: 2: 214-231.



- Dernbach, J. C. 2003. “Achieving sustainable development: The Centrality and multiple facets of integrated decisionmaking”. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 247-285.
- Devas, Nick. 1997. “Indonesia: what do we mean by decentralization?”, dalam *Public Administration and Development Journal*, Vol. 17.
- Department for Communities and Local Government. 2011. *Decentralisation outcomes: a review of evidence and analysis of international data*, Centre for Urban and Regional Development, Newcastle University and Department of Geography and Environment, London School of Economics, Eland House Bressenden Place London.
- Diaz-Serrano, L. & A. Rodríguez-Pose. 2011. *Decentralisation, happiness and the perception of institutions*”, SERC Discussion Paper. London: Spatial Economics Research Centre.
- Dobson, A. 1991. *The Green Reader: Essays toward a Sustainable Society*. Mercury House, San Francisco, 280 pp. ISBN: 1562790102.
- Dreher, A. 2006. “Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization”. *Applied Economics*, 38, 1091–1110.
- Dubois, H.F.W. & Fattore, G. 2009. “Definitions and typologies in public administration research: The case of decentralisation”. *International Journal of Public Administration*, 32(8), 704–727.
- Eaton K. 2001. *Political Obstacles to Decentralization: Evidence from Argentina and the Philippines*. *Development and Change*, Vol. 32 (1), 101-127.
- Easterlin, Richard A. 2001. “Income And Happiness: Towards A Unified Theory”. *The Economic Journal*, 111 (July), 465–484.



- # Royal Economic Society 2001. Published by Blackwell Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Ebel, R.D., Yilmaz, S. 2002. “*On the measurement and impact of fiscal decentralization*”. Policy Research Working Paper 2809, World Bank.
- Egomwan, J.A. 1984. *Principles and Practice of Local Government in Nigeria: An Insight into the Problems of Public Policy Formulation and Implementation*. Benin City: SMO Aka and Brothers Press.
- Elkington. J. 1998. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. New Society Publishers, Gabriola Island, BC; Stony Creek, CT, 424 pp. ISBN: 0865713928 9780865713925.
- Fajonyomi, O. S. & Olu-Owolabi, F. E. 2013. “*Good Governance and Local Government Administration for Development: Multiple Perspectives*”. *Journal of Capital Development in Behavioural Sciences*, 1(2).
- Ferrazzi, Gabriele. 2007. *International Experiences in Territorial Reform – Implications for Indonesia*. Jakarta: USAID-DRSP.
- _____. 2008. “*Special Autonomy: A Common Form of Asymmetric Decentralization*”, Paper for Aceh Workshop, November 19, 2008.
- Fiszbein, A. 1997. *The Emergence of Local Capacity: Lessons from Colombia*. *World Development*. 25 (7). pp. 1029–1043.
- Flint R. W. and M.J.E. Danner. 2001. The nexus of sustainability & social equity: Virginia’s Eastern Shore as a local example of global issues. *International Journal of Economic Development* 3. Available at: <http://www.spaef.com/article/1055/The->



- Nexus-of-Sustainability-&-Social-Equity:-Virginia%27s-EasternShore-%28USA%29-as-a-Local-Example-of-Global-Issues.
- Frug, G. 1980. *The city as a legal concept*. Harvard Law Review 93:1057-1154.
- Galbraith, J. K. 1955. *The Great Crash*. Penguin Books.
- Gemandze, B.J. 1994. *The Failure Of Decentralization Policy In Cameroon: An Analysis Of The 1974 Law On Local Government Reform (1974-1994)* Institute of Social Studies P.O. Box 29776 2502 LT, The Hague The Netherlands.
- Grindle M.S. 1981. "Anticipating Failure: The Implementation of Rural Development Programs". *Public Policy*, 29: 1: 51-74.
- Gourevitch, P.A. 1979. The Re-Emergence of "Peripheral Nationalisms": Some Comparative Speculations on the Spatial Distribution of Political Leadership and Economic Growth. *Comparative Studies in Society and History* 21 (303– 322).
- Ghoshal, Baladas. 2004. "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia", dalam: *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 26. No. 3, pp. 506-529.
- Hamlin, Alan P. 1991. "Decentralization, Competition and the Efficiency of Federalism", *The Economic Record*, Vol. 67, No. 196, September, 193-204.
- Hay, P. 2006. "A Phenomenology Of Islands", *Island Studies Journal*, 1 (1): 19-42.
- Hays R.A. 1985. "Perceptions of Success or Failure in Program Implementation: The "Feedback Loop" in Public Policy Decisions" *Policy Studies Review*, 1: 51-67.
- Hache, J.-D. 1998. "Towards a political approach to the island question", in G. Baldacchino & R. Greenwood (eds), *Competing*



- strategies of socio-economic development for small islands*, Institute of Island Studies, Charlottetown.
- Hepburn, Eve. 2010. *A Comparative Analysis of Island Region Autonomy* Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association (CPSA), Concordia University, Montreal, 1-3 June 2010, University of Edinburgh.
- Hendratno, E.T. 2007. *Desentralisasi yang Mengarah ke Sistem Federal dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara*. Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4, No. 2.
- Hidayat, Syarif. 2004. *Kegamangan Otonomi Daerah?*. Pustaka Quantum, Jakarta, 2004, hlm. 29.
- _____. 2008. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*. Jurnal POELITIK, Vol. 1, No. 1 2008.
- Hirawan, Susiyanti. 2007. “Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia”. Pidato pada Penganugerahan Guru Besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 24 Februari 2007.
- Hoessein Bhenyamin. 1995. *Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek, dalam Menelaah Format Politik Orde Baru*. Jakarta: PPW-LIPI –Yayasan Insan Politika –Gramedia.
- Ibok, Enefiok E. & Ekpe A. Ntekim. 2014. *Local Government in Inter-Governmental Relations in Nigeria: Effects on Governance and Project Implementation*. OSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 9, Ver. IX (Sep. 2014), PP 01-06e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org



- Indonesian Rapid Decentralization Appraisal. 2002. *Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*. Jakarta: Asia Foundation.
- Ingram, Helen M. & Dean E. Mann. 1980. *Why Policies Succeed Or Fail*. Published 1980 by Sage Publications in Beverly Hills.
- Ife, J., 2007. *Human Rights and Peace*. In *Handbook of Peace and Conflict Studies* (pp. 160–172). <https://doi.org/12.4>.
- _____. *Human Rights from Below-Achieving rights through community development*. The Edinburgh Building CB2 8RU, Cambridge University Press.
- Isioma, U.I. 2010. “Strengthening Intergovernmental Relations for Improved Service Delivery in South Africa: Issues for Consideration”. *Journal of US-China Public Administration*, 7(1): 51-57.
- Jalan, Joytsna & Martin Ravallion. 2002. “Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in China”. *Journal of Applied Econometrics* 17 (4): 329–46.
- Jackson, R. 2008. “Islands on the Edge: Exploring Islandness and Development in Four Australian Case Studies”, Unpublished PhD thesis, University of Tasmania.
- JLGG Newsletter. 1999. *Decentralization: New Legislation Boosts Japan’s Local Authorities*. Issue No.31, Summer.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2012. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Katorobo, James. 2004. *Decentralization And Local Autonomy For Participatory Democracy*, Makerere Institute of Social Research Kampala, 6th Global Forum on Reinventing Government



- Towards Participatory and Transparent Governance 24 – 27 May 2005, Seoul, Republic of Korea.
- Keban, Yeremias T. 2004. “*Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia*,” *Jurnal JKAP*, Vol. 8, No. 2. November, 18.
- Keuffer, Nicolas. 2016. *Local Autonomy, a Multifaceted Concept: How to define it, How to Measure it and How to Create a Comparative Local Autonomy Index?* Paper presented at the 24th IPSA World Congress, Poznań, Poland, 23-28 July 2016.
- Kisakye, J. 1996. *Political Background to Decentralization.* In Democratic Decentralization in Uganda, eds. S. Villadsen and F. Lubanga (Kampala, UG: Fountain), pp. 36-46.
- King, R. 1993. “*The Geographical Fascination of Islands*” in D. Lockhart, P. Schembri, and D. Smith (eds). *The Development Process in Small Island States*. London: Routledge.
- Klarin, Tomislav. 2018. *The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues.* *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 21, No. 1, pp. 67-94, 2018.
- Kochen, M. and K.W. 1980 Deutsch. *Decentralization: Sketches Toward a Rational Theory*, Cambridge, MA: Oelgeschlager, Gunn and Hain.
- Kumlin, S., & Rothstein, B. 2005. *Making And Breaking Social Capital The Impact Of Welfare-State Institutions The Theory Of Social Capital And The Scandinavian Puzzle.* *Comparative Political Studies*, 38(4), 339–365.
- Ladner, A. 1994. *Finanzkompetenz in der Gemeinde - Ein Überblick über die Praxis.* In *Finanzen der öffentlichen Hand Nr. 5 “Finanzföderalismus”*, edited by F. Eng, A. Glatthard and



- B. H. König, 65-85, Bern: Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden.
- Landau, Martin and Eva Eagle. 1981. "On the Concept of Decentralization" Paper prepared for the Project on Managing Decentralization. Institute of International Studies, University of California, Berkeley.
- Larson, A.M., and J.C. Ribot, eds. 2005. *Democratic Decentralization. Through a Natural Resource Lens*. Vol. 16. London: Routledge.
- Lay, C. 2013. "Desentralisasi Asimetris: Sebuah Model Bagi Indonesia?" Makalah pengantar Sidang Komite I DPD RI.
- Lessmann, C. 2009. "Fiscal Decentralisation and Regional Disparity: Evidence from Cross-Section and Panel data." *Environment and Planning A* 41: 2455-2473.
- Le Compe, M.D. & Goetz, J.P. 1982. *Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research* 52 (no. 1): 31-60.
- Litvack, J., J. Ahmand, & R. Bird. 1988 *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. World Bank: Washington, DC.
- Lijphart, A. 1999. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in ThirtySix Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Lubis, Solly. 2003. "Masalah-Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". Makalah disampaikan pada: seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.
- Madubun, Jusuf, dkk. 2017. *The Prototype Model of Asymmetric Decentralization in Providing Public Services to the Island Areas*.



- Department of Public Administration of Universitas Negeri Makassar, Jln. Bonto Langkasa Kampus Gunung Sari Baru, Makassar, South Sulawesi, Indonesia Mediterranean Journal of Social Sciences MCSEER Publishing, Rome-Italy, Vol. 8, No. 2, March 2017.
- Majumder, Rajarshi. 2012. *Removing poverty and inequality in India: The role of infrastructure*. MRPA Paper No. 40941, Munich Personal RePEc Archive (MRPA).
- Mayer, Bruce D. & James X. Sullivan. 2002. "The effects of welfare and tax reform: the material well-being of single mothers in the 1980s and 1990s". *Journal of Public Economics* 88 (2004) 1387– 1420.
- Mathebula, F.M. 2004. *Intergovernmental Relations Reform in a Newly Emerging South African Policy*. Pretoria: University of Pretoria.
- McKinnon, J., 1988. 'Reliability and validity in field research: Some strategies and tactics', *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 1(1), 34–54. <http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000004619>.
- Montero, Alfred P. & David J. Samuels (eds.). 2004. *Decentralization and Democracy in Latin America* (Notre Dame, IN: The University of Notre Dame Press, 2004), pp. ix + 309.
- Mick, Moore & James Putzel. 1999. *Politics and Poverty: A Background Paper For The World Development Report 2000/1*, <http://www.worldbank.org/poverty/>.
- McGarry, John. 2007 "Asymmetry in federations, Federacies, and Unitary State;," *Journal of Ethnopolitics*. Vol. 6, No. 1, March 2007, pp 105-116.



- Midgley, J. 2006. *Developmental Social Policy: Theory and Practice*. *Asian Journal of Social Policy*, 2(1), 1–22. Retrieved from [http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle: Developmental + Social+ Policy:+ Theory + and + Practice # 7](http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Developmental+Social+Policy:+Theory+and+Practice#7).
- Musgrave, R.A. 1959. *The theory of public finance: a study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Murdiyarmo, D. 2010. Climate and development—the challenges in delivering the promises: an editorial essay. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 1,765–769. doi: 10.1002/wcc.19, ISSN: 17577780.
- Ndraha, Taliduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan*. IIP, Jakarta.
- Nurkin, Baharuddin. 2006. *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Perennial*, 2 (1): 25-30.
- Nwatu, J.R. and Okafor, C.I. 2008. *Comparative Local Government Administration*. Enugu: Academic Publishing Company.
- Oates, W.E. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Okereke, C. 2011. Moral Foundations for Global Environmental and Climate Justice. *Royal Institute of Philosophy Supplements* 69, 117–135. doi: 10.1017/S1358246111000245.
- Okoli, M.U. 2005. *Local Administrative System: An Introductory and Comparative Approach*. Onitsha: Abbot Hooks Ltd.
- Olowu, Dele. 2003. *Local Institutional And Political Structures And Processes: Recent Experience In Africa*, *Public Admin. Dev.* 23, 41–52 (2003) Copyright # 2003 John Wiley & Sons, Ltd.



- Olowu, D. & Wunsch, J. S. 2004. *Local Governance in Africa: The Challenges of Democratic Decentralization*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Olopade, O. 1984. "Management of Intergovernmental Relations in Nigeria: Problems-and Prospects". *ASCON Journal of Management*, 3(1): 41-50.
- Omar Azfar, Satu Kähkönen, Anthony Lanyi, Patrick Meagher, and Diana Rutherford. 1999. *Decentralization, Governance And Public Services The Impact Of Institutional Arrangements A Review Of The Literature* IRIS Center, University of Maryland, College Park. September 1999.
- O'Sullivan, T. 2003. *Local Areas and Structures*. In: Callanan, M. & Keogan, J. F. (eds.). *Local Government in Ireland. Inside Out* (pp. 41-81). Institute of Public Administration: Dublin.
- Pratchett, L. 2004. "Local autonomy, local democracy and the 'new localism'", *Political Studies* 52: 358-375.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A. & Tomaney, J. 2007. "What kind of local and regional development and for whom?", *Regional Studies*, 41, 9, 1253–1269.
- Phillimore, John, 2013, "Understanding Intergovernmental Relations: Key Features and Trends". *Australian Journal of Public Administration*, vol. 72, no. 3, pp. 228–238 doi:10.1111/1467-8500.12025 Curtin University. © 2013 National Council of the Institute of Public Administration Australia.
- Pope J, D, Annandale, and A. Morrison-Saunders, 2004. Conceptualising sustainability assessment. *Environmental Impact Assessment Review* 24, 595–616. doi: 10.1016/j.eiar.2004.03.001, ISSN: 01959255.



- Prud'homme, Remy., 1995, *The Dangers Of Decentralization*, The World Bank Research Observer, vol. 10, no. 2 (August 1995), pp. 201-20. © 1995 The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK.
- Requejo, Ferran, and Klaus-Ju'rgen Nagel, eds. 2011. *Federalism beyond Federations: Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe (Federalism Studies)*. Surrey/Burlington: Ashgate.
- Rhodes, R.A.W. 1986, *The national world of local government (New Local Government Series, 26)*, Winchester, US. Allen & Unwin, 459pp.
- Robertson D.B. 1984. *'Program Implementation Versus Program Design: Which Accounts for Policy "Failure"?*, *Policy Studies Review*, 3: 3-4: 391-405.
- Rosenbaum, Allan., 2013. *"Decentralization and Local Governance: Comparing US and Global Perspectives."* *Halduskultuur – Administrative Culture* 14 (1), 11-17 Florida International University, USA
- Rodríguez-Pose, A. & N. Gill, 2005. *"On the 'Economic Dividend' of Devolution."* *Regional Studies* 39(4): 405-420.
- Rodríguez-Pose, Andrés and Sylvia Tijmstra, 2009 *On the emergence and significance of local economic development strategies*, Department of Geography and Environment Spatial Economics Research Centre London School of Economics, CAF Working paper N° 2009/07.
- Rondinelli, Dennis A., 1980, "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries", *International Review of Administrative Sciences*, 1980, Vol. 47, p.137-139.



- _____. 1999, *What is Decentralization?*, in World Bank, Decentralization Briefing Notes, WBI Working Papers.
- Rondinelli, Dennis A. & John R. Nellis. 1986. *Assessing Decentralization Policies in Developing Countries: The Case for Cautious Optimism' Development Policy Review*. (SAGE, London, Beverly Hills and New Delhi), Vol. 4 3-23.
- Rondinelli Dennis, John R. Nellis & G. Shabbir Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries A Review of Recent Experience*, World Bank Staff Working Papers Number 581 Management And Development Series Number 8 The World Bank Washington, D.C., U.S.A.
- Rondinelli Dennis & G. Shabbir Cheema. 1983. "Implementing Decentralization Policies: An Introduction" dalam Cheema & Rondinelli (ed.), *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. California: Sage Publication in cooperation with UNCRD, h.15-16.
- Rolla, G. 2005. *L'organizzazione Territoriale Della Repubblica*. Milano, 2005, p.75 ss.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. 1983. *Policy implementation*. In S. S. Nagel (Ed.), *Encyclopedia of Policy Studies* (pp. 143-169). New York: Marcel Dekker.
- Salomo RV. 2006. *Pokok-pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bagian Perangkat Daerah)*, Depdagri kerjasama GTZ, Jakarta (diakses 14 Juni 2018) <http://www.desentralisasi.org>.
- Schatzberg M.G. 1982. 'Le Mal Zairois: Why Policy Fails in zaire' *African Affairs*, 81: 324: 337-348.
- Scharpf F.W. 1986. 'Policy failure and institutional reform: Why should form follow function?', *Journal*, 108: 179-189. *International Social Science*.



- Sharpe, W. F. 1981, *Decentralized Investment Management* The Journal Of Finance * Vol. Xxxvi, No. 2 * May 1981.
- Sneddon C, R.B. Howarth, and R. B. Norgaard.2006. Sustainable development in a post-Brundtland world. *Ecological Economics* 57, 253–268. doi: 10.1016/j. ecolecon.2005.04.013, ISSN: 0921–8009.
- Spahn, David. 1997. “*Decentralized Government and Macroeconomic Control. Infrastructure* Notes FM-12 Washington, D.C: World Bank.
- Stoddart, H. 2011. A Pocket guide to sustainable development governance. Stakeholder Forum.
- Susetiawan., 2010, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak*, Working Paper, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Suwandi, Made., 2002, *Pokok-Pokok Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta, materi artikel tidak dipublikasikan
- Soejito, Irawan., 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 30-34.
- Smoke, Paul. 2011. ‘*Decentralization in Africa: Goals, Dimensions, Myths and Challenges*’, p. 9; Fox, ‘*Fiscal Decentralization in Post-Conflict Countries*’, p. 5.
- Smith T.B. 1989. “*Analysis of Policy Failure: A Three Dimensional Framework*”, *The Indian Journal of Public Administration*, 35: 1: 1-15.
- Sverrisson A. Crook R., 2001. *Decentralization and Poverty Alleviation in Developing Countries: A Comparative Analysis, or Is West Bengal Unique?*, Institute of Development Studies: Brighton.



- S.J. Burki, G. Perry & W. Dillinger., 1999, *“Beyond The Center: Decentralizing The State”*, *World Bank Latin American and Caribbean Studies*, Washington DC: World Bank, h. 3.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI.
- Tanzi, V. 1996, *“Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects,”* Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1995, World Bank, Washington, D.C., pp. 295-316.
- Ter-Minassian, T. 1997. (ed.). *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. International Monetary Fund, Washington DC.
- Tarlton, Charles D. 1965. *Symmetry And Asymmetry As Elements Of Federalism: A Theoretical Speculation*; University Of Californma, Berkeley, Source: *The Journal Of Politics*, Vol. 27, No. 4 (Nov., 1965), Pp. 861-874 Published By: The University Of Chicago Press On Behalf Of The Southern Political Science Association.
- Tillin, Louise., 2006, *“United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism”*, dalam *Publius: The Journal of Federalism*, Volume 37 Number 1. Oxford University Press.
- Tiebout, C.M. 1956. *A Pure Theory of Local Expenditures*. *The Journal of Political Economy* 64 (5): 416-424.
- The following definitions in this sub-section are extracted from: UNDP, 1997, *Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development*,

- Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy*, September 1997, pp. 5-6.
- Töpperwein, Nicole, 2004, *Participation in the decision-making process as a means of group accommodation*. In: Tarr GA, Williams RF, Marko J (eds) *Federalism, subnational constitutions, and minority rights*. Praeger, Westport.
- Töpperwien, N. 2010. *Peace Mediation Essentials: Decentralization, Special Territorial Autonomy, and Peace Negotiations*. Sonnenbergstrasse 17: Mediation Support. Retrieved from www.swisspeace.ch/mediation.
- Turner, Mark & David Hulme. 1997. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*, London: Macmillan Press Ltd., h.152.
- The World Bank., 2008, *Independent Evaluation Group. Decentralization in Client Countries – An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007*, 2008. h. 10-11.
- Treisman, Daniel. 2002. *Defining And Measuring Decentralization: A Global Perspective*, Department Of Political Science University Of California, Los Angeles.
- UNCED, United Nations Conference on Environment and Development (1992b). *Rio Declaration on Environment and Development 1992*. Retrieved November 3, 2015, from <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm>.
- UN, United Nations. 2015 d. *The Millennium Development Goals Report 2015*. Retrieved November 5, 2015, from [http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20\(July%201\).pdf](http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf).



- URBAN research in the developing world. A four volume series, edited by Richard Stren. Toronto: Centre for Urban and Community Studies. vol. 1 – Asia, 1994; vol. 2 – Africa, 1994; vol. 3 – Latin America, 1995; and vol. 4 – Perspectives on the City, 1995.
- Veljanovski, Aleksandra Maksimovska. 2010. *The Model Of The Asymmetric Fiscal Decentralisation In The Theory And The Case Of Republic Of Macedonia*, Iustinianus Primus Law Review, 2010, Vol. 1.1.
- Vaillancourt, Francois. 1992. “*English and Anglophones in Quebec: An Economic Perspective*,” in *Survival – Official Language Rights in Canada* (Toronto: C.D. Howe Institute).
- Villamil, J.J., 1977. ‘*Size And Survival: Planning In Small Island Systems*’, *Microstate Studies*, vol. 1: 1-17.
- Watts, Ronald L. 2000. “*Asymmetrical Decentralization: Functional or Dysfunctional*,” *Indian Journal of Federal Studies* 1/2004 Copyright (c) Center for Federal Studies, Jamia Hamdard, New Delhi, India.
- Warrington, E. 1998. ‘Introduction: Gulliver and Lilliput in a new world order: the impact of external relations on the domestic policies and institutions of microstates’, *Public Administration and Development*, 18(2): 101-105.
- Warrington, E & D. Milne. 2007. ‘*Island governance*’, in G. *Baldacchino (ed)*, *A world of islands: an island studies reader*, Agenda Academic and Institute of Island Studies, Malta & Canada, pp. 379-427.
- Wallich, Christine, editor. 1994. *Russia and the Challenge of Fiscal Federalism* (Washington: The World Bank).



- Walgrave, Stevaan. 2008. *Governance: an International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol 21, No 3 July 2008 (pp.365-395).
- Walker David. 2000. *Living with ambiguity the relationship between central and local government*, Joseph Rowntree Foundation.
- _____. 2002. *In Praise of Centralism: A Critique of the New Localism*. London: Catalyst Forum.
- Weingast, B. R. 2009. "Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives." *Journal of Urban Economics* 65: 279-273.
- Wilson, Robert H. 2000, *Understanding Local Governance: an international perspective*, RAE - v. 40 • n. 2 • Abr./Jun. 2000 *Revista de Administração de Empresas/EAESP/FGV*, São Paulo, Brasil.
- Wolman, Harold, & Michael Goldsmith. 1990. *Local Autonomy as a Meaningful Analytic Concept*. *Urban Affairs Quarterly* 26, 1 (September): 3-27.
- Wolff, S. 2013. *Conflict Management in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-Governance*. *International Journal on Minority and Group Rights* 20: 27-50.
- World Bank. 2004. *World Development Report 2004: Making Services Work for the Poor*, Washington, DC.
- _____. 2011. *Penilaian Status Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk Pelayanan Pemerintah Daerah: Laporan Akhir*. Washington, DC.
- Wraith, R. 1972. *Local Administration in West Africa*. George & Unwin, London.



- Wunsch JS. 2001. *Decentralization, local governance and 'recentralization' in Africa*, Public Administration and Development 21(4): 277–288.
- Zaharia, Petronela. 2011. *Autonomy And Decentralization - Current Priorities In The Local Public Administration Management*, The Annals of The “Ștefan cel Mare” University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, Vol. 11, No. 2(14), 2011.
- Zuhro, S. 2013. *Relasi Antara DPRD dan Kepala Daerah Era Pilkada*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 40 Tahun 2013, 51-71. Jakarta: MIPI.
- _____. 2016. *Otoda Dalam UU Pemda Baru: Masalah Dan Tantangan Hubungan Pusat Dan Daerah*, Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No. 2 Desember 2016 | 213– 225.

BERITA KORAN/BULETIN/INTERNET

- Aitken Kolehmainen, Riitta-Liissa. 1999. “*Decentralization of the Health Sector*”, World Bank Institute (ed.), *Decentralization Briefing Notes*, WBI Working Papers, <http://www.worldbank.org/>.
- Alie Marzuki. *Penataan Sistem Politik dan Otonomi Daerah* <http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=66> diunduh tanggal 12/11/2018.
- Cornelius 1999; Fox & Aranda 1996; Rodden 2000; Rodden & Wibbels 2002; Stein 1998. Dikutip dari Tulia G. Falleti, *A Sequential Theory of Decentralization and Its Effects on the Intergovernmental Balance of Power: Latin American Cases In*

- Comparative Perspective*, Working Paper #314, July 2004, <http://www.ciaonet.org/>.
- Einar Braathen. 2008. *Decentralisation and Poverty Reduction, A Review of the Linkages in Tanzania and the International Literature*, Norad Report 22b/2008 Discussion, Norwegian Agency for Development Cooperation, <http://www.norad.no/items/14184/38/2084279701/Decentralisation;>
- Elhiraika, A. B. 2007. Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa. African Trade Policy Centre, Work in Progress, No. 58. Didownload dari <http://www.uneca.org/atpc/Work%20in%20progress/58.pdf>.
- Keith McLean & Elizabeth King. 1999. “*Decentralization of the Education Sector*”, in World Bank Institute (ed.), *Decentralization Briefing Notes*, WBI Working Papers, <http://www.worldbank.org/>.
- Mazol, Aleh. 2015. *Local self-governance in the Republic of Belarus*, BERO Policy Paper Series, PP No. 22.
- Merriam-Webster.com. 2019. “Definition of archipelago”. Merriam-Webster. Tersedia pada <http://www.merriam-webster.com>. Diakses pada 12 July 2019.
- SMERU. 2002. *Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian version)*, Laporan Penelitian, Jakarta, h.21-22; <http://www.smeru.or.id/report/field/>.
- Sverrisson A. Crook R. 2001. *Decentralization and Poverty Alleviation in Developing Countries: A Comparative Analysis, or Is West Bengal Unique?*, Institute of Development Studies: Brighton.



- Steiner, Susan. 2006. *Decentralization in Uganda: Exploring the Constraints for Poverty Reduction*, GIGA Working Paper No. 31: Research Programme: Transformation in the Process of Globalisation. German Institute for Global and Area Studies, 2006. Retrieved May 5, 2009 from <http://www.giga-hamburg.de/workingpapers>.
- Vedi R. Hadiz. 2003. *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Working Papers Series No.47, City University of Hong Kong: Southeast Asia Research Center, h.16; <http://www.gtzsfdm.or.id/documents/>.
- World Bank. 2000. *Helping Countries to Combat Corruption: Progress at the World Bank since 1997*, Washington DC: World Bank.
- _____. 2001. "Decentralization and Governance: Does Decentralization Improve Public Service Delivery?", in PremNotes No.55, June 2001, <http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/>.
- William Dillinger. 1994. *Decentralization and Its Implications for Urban Service Delivery*, Urban Management Program Discussion Paper 16 (Washington, DC: World Bank), dalam Richard C. Crook and James Manor, 1998, *Democracy and Decentralization in South-East Asia and West Africa: Participation, Accountability, and Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sasaoka, Yuichi. 2007. *Decentralization and Conflict*, The 889th Wilton Park Conference, Japan International Cooperation Agency; Joseph Siegle, and Patrick O'Mahony, *Assessing the Merits of Decentralization as a Conflict Mitigation Strategy*, <http://www.dai.com/pdf/Decentralization>.

<http://www.BPS.go.id>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan.

<http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/data-dan-statistik1/sumber-daya-manusia-dan-kebudayaan/>.

<http://www.antaraneews.com/print/338767/kesenjangan-sosial-ekonomi-indonesia-kian-menganga> diunduh tanggal 30 Desember 2016.

<https://nttbangkit.wordpress.com/suku-di-ntt/diunduh> tanggal 1 November 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>.

www.antaraneews.com, 15 Oktober 2012.

Sindo, Edisi 14-12-2016.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3966>, Berita parlemen, RUU Pemerintahan Daerah Pertegas Pembagian Wewenang Pemerintahan 25-05-2012/PANITIA KHUSUS, diunduh tanggal 12/11/2018.

<https://www.slideshare.net/researchersyndicate/implikasi-implementasi-kebijakan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-terhadap-pemerintah-pusat-dan-daerah-suryanto> diunduh 27 November 2017.

<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Desentralisasi> Diunduh Tanggal 18/11/2019.

<https://Www.Merriam-Webster.Com/Dictionary/Decentralization?Src=Search-Dict-Box> Diunduh Tanggal 18/11/2019.

<https://Dictionary.Cambridge.Org/Dictionary/English/Decentralization> Diunduh Tanggal 18/11/2019.

<http://Www1.Worldbank.Org/Publicsector/Decentralization/What.Htm>



- Laporan/Naskah Akademik/Peraturan Perundang-undangan.
Naskah UUD 1945 Hasil amendemen.
Naskah UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Naskah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Naskah UU Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Naskah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Naskah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Naskah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
UNDP, Human Development Report 2015 Work for Human
Development
Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang
Tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, 2 April 2012.
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku II Sendi-sendi/Fundamen
Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi 2010.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

INDEKS

A

Agency Model 39
Aland, kepulauan 12
Anglo saxon model 60-63
appointment decentralization 48
areal decentralization 94
Asosiasi Pemerintah Provinsi
 Seluruh Indonesia 223
asymmetric federation 114
Azores, kepulauan 12

B

Badan Kerjasama Provinsi
 Kepulauan (BKSPK) 166
Bagir Manan 50, 77
balance of power 26
Bhenyamin Hoessein 50

C

compliance approach 150

concurrent functions 207
content of policy 147
context of implementation 147
Coordinate Authority Model 36, 38
cost recovery 4

D

David Walker 34
decisionmaking decentralization
 47-48
Deklarasi Djuanda 194
desentralisasi asimetris 9, 11,
 109
disparitas regional 5
dispersion of power 41
double majority 28

E

electoral decentralization 48
eropa continental model 60, 63-64

F

Faroe, kepulauan 12
federal arrangement 58
field administration 70-71
fiscal decentralization 48
 Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) 222
 Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 222
functional decentralization 94

G

general-competence, pola 97-98, 101, 125
 Geoffry Duedly 245
 Gerald S. Maryanov 67
 Greenland 12

H

H.D. Stout 75
 Hans Kelsen 51, 68

I

Inclusive-Authority Model 36, 37
 Indeks Pembangunan Manusia 16-21
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 121, 126
 Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) 107

Interaction Model 39

Isle of Man 12

J

Jeremy Richardson 245

L

local self government 70-71
local state government 70-71
Long Arm Short Finger (LASF) 348

M

Madeira, kepulauan 12
 Matriks Draft DIM 221
 Model Partnership 36
money follows function, prinsip 31

N

national unity 3
new public management 84

O

open-end arrangement 97-98
 Orde Baru 98-99
 otonomi asimetris 9-10
Overlapping-Authority Model 36

P

pendekatan anggaran/keuangan 30
 Pendekatan demokratis 29



Pendekatan Konstitusi/
 Pendekatan Hukum 29
 pendekatan normatif-operasional
 32
personnel decentralization 49
political approach 150
power of contractation 52
power of immunity 52-53
power of imperation 52
power of initiation 52
Principal/Agent Model 36, 37
 proses perumusan kebijakan 142

R

Relative Authonomy Model 39
residual functions 71
 Richard Bird 48

S

separated system 296
Short Arm Long Finger (SALF) 348

SMERU 107
 Stevaan Walgrave 198

T

Thomas Jefferson 47
triple bottom line 327

U

ultra vires doctrine 98, 125
unified system 296
unitary state 58

V

vertical decentralization 47

W

written consatitution 187





TENTANG PENULIS

Petrus Polyando, lahir di Orinbelan Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Flores NTT pada 30 Juli 1978 dari pasangan Bapak Albinus (alm.) dan Ibu Agnes (alm.). Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Katolik, telah memiliki seorang istri atas nama Inge Sri Nurhayati, S.Kom. dan dua orang putri, yaitu Margaretha Roswita Putri Polyando dan Brianna Anzelie Putri Polyando. Kini penulis beralamat di Kompleks Permata, Jalan Permata Raya 1 Blok F1 Nomor 15 RT 4 RW 13, Cimahi-Jawa Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 1990 lulus dari SD Inpres Klotong, Kemudian melanjutkan di SLTP Negeri Bola dan lulus pada tahun 1993. Pada 1996 lulus dari SMA Negeri Maumere dan melanjutkan Pendidikan ke STPDN Bandung, lulus 2000. Pendidikan S-2 ditempuh di Pascasarjana MAPD lulus 2008. Selanjutnya menyelesaikan program Doktor Ilmu Pemerintahan di UNPAD tahun 2019 dengan predikat *cumlaude*.

Riwayat pekerjaan; penulis pernah bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, kemudian melanjutkan karier sebagai dosen di IPDN mulai tahun 2009 sampai sekarang. Saat ini aktif dalam berbagai kegiatan pendampingan pengkajian maupun penelitian di lingkungan pemerintah daerah bersama tim IPDN. Dengan semangat: *Seimbangkan Tutar, Tulis dan Laku*, buku ini penulis persembahkan buat orang-orang tercinta: Kedua orangtua yang telah dipanggil Tuhan, istri tersayang yang telah mendukung siang dan malam, dan kedua buah hatiku Putri Polyando. Akhirnya semoga memberikan manfaat bagi banyak orang dan memudahkan karya selanjutnya. *Verba volant, scripta manent* (Kata-kata boleh terbang tetapi tulisan akan tetap tinggal).

